

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode penelitian skripsi dan metode penelitian Hukum*, fakultas Hukum USU, Medan
- Ahmat Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perindungan konsumen*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta 2001
- Departemen perindustrian dan perdagangan, *Panduan pedoman penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jakarta 2002
- Departemen perindustrian dan perdagangan, *Menuju konsumen mandiri, seri -1, bangkitlah konsumen*. Jakarta, 2002.
- Departemen perindustrian dan perdagangan, *kebijakan pedagangan dalam negeri di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen*, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif penyelesain sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2001
- Miru Ahmat dan Yodo Sutarnan, *Hukum perlindungan konsumen*, PT. Rajagrafinda, Jakarta, 20004.
- Mariam Darus Badruzaman, *kompilasi hukum perikatan*, PT. Citra aditya bakti Bandung ,2001.
- Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta 2000
- Sudaryanto , *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Peraturan perundang-undangan
- Dunne.J.M.nandan van derghft, *Perbuatan melawan hukum*, terjemahan KPH Hapsoro jaya ningprano, Ujung Pandang, 1988
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar hukum*, Sumur Bandung ,1976



Drs.HM.Dharma bakti nasution, SH,MBA, *Badan Penyelesaian sengketa konsumen*,Medan 2003.

Drs.HM.Dharma bakti nasution, SH, MBA *Perlindungan konsumen suatu tinjauan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Medan 2006

Soedaryanto, *Makalah peranan LPKSM dalam Penyelenggaraan perlindungan konsumen*, Jakarta,2002

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Pradnya paramita, Jakarta

Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, *Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen*.

Peraturan Pemerintah nomor: 57 tahun 2001 tentang *,Badan Penyelesain Sengketa Konsumen*.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang,*Badan pembinaan dan pengawasan konsumen swadaya masyarakat*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 tentang, *Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang,Kota Jakarta pusat,Kota Jakarta barat , Kota Bandung Kota Semarang.Kota Yogyakarta,Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar*.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang, *Pengangkatan,penghentian anggota dan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa konsumen*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang, *Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*.